

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia” berdasar kedamaian abadi dan kesejahteraan sosial.<sup>1</sup>

Dunia perusahaan adalah dunia harta, karena harta yang diputar untuk mengembangkan usaha disebut dengan modal. Dunia usaha berputar dalam rangka pengembangan harta dan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun melalui investai modal. Semua kegiatan terjadi melalui usaha mengelola modal dan kerja dalam mengembangkan harta dari waktu ke waktu. Sehingga harta menjadi berputar dan dapat memberikan keuntungan.

---

<sup>1</sup> Kaelan. *Pendidikan Pancasila (8th.ed)* Yogyakarta: Paradigma. 2004, hlm 159

Menjalankan usaha harus adanya modal, karena modal adalah pokok utama dalam menjalankan usaha, kebanyakan masyarakat memerlukan modal usaha dengan cara meminta bantuan modal usaha Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bandung.

Pelaksanaan mengelola usaha karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi sedangkan kemampuan untuk itu kurang, maka keadaan demikian akan menimbulkan masalah permodalan. Masalah permodalan merupakan satu bagian dari masalah dalam mengelola usaha yang dihadapi oleh pengusaha. Karena untuk memperkecil atau menekan timbulnya masalah tersebut, pada waktu pendirian perusahaan hal-hal berikut harus diperhatikan:

- a. Berapa besarnya modal harus dipenuhi untuk kebutuhan pertama, yaitu biaya lahan, pembangunan dan peralatan mesin-mesin yang digunakan dan biaya-biaya cadangan. Jumlah dan besarnya biaya atau permodalan akan diketahui pendekatannya melalui analisis pembiayaan yang mantap, sehingga pengusaha akan dapat mengukur kemampuan dan memperkirakan dari mana modal akan dipenuhi.
- b. Bagaimana memperoleh modal yang diperlukan, apakah dapat dipenuhi dengan kekayaan atau perlu melibatkan para

penanam modal atau pinjaman dari luar, misalnya kredit Bank. Apakah perlu mengadakan *Joint Enterprise*, sebab penggunaan kredit jangka panjang dan kredit jangka pendek harus menanggung bunga yang jumlahnya tidak sedikit, walaupun kredit-kredit mudah diperoleh.

- c. Harus membuat planning untuk tindakan-tindakan yang akan dijalankan dan planning dalam permodalan, karena tanpa planning jalannya sebuah usaha akan kacau balau, yang berarti dengan adanya planning tersebut maka tinggal melaksanakannya dengan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hal planning yang sudah tidak sesuai lagi, untuk tindakan selanjutnya, dengan melakukan perbaikan planning<sup>2</sup>.

Pelaku usaha memenuhi unsur-unsur bakat yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Apakah pengertian dari pelaku usaha kecil dan pelaku usaha menengah semuanya adalah seorang wirausahawan. Mereka memiliki sejumlah sifat atau pembawaan sebagai seorang wirausaha. Mereka mempunyai kemauan dan rasa percaya diri yang tinggi, mereka fokus kepada sasaran, mereka mau bekerja keras,

---

<sup>2</sup>Adi Sutanto. *Kewiraswastaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002),h.115

mereka berani mengambil risiko, mereka berani bertanggung jawab dan mereka mampu berinovasi.

Melaksanakan pembangunan di samping untuk meningkatkan pendapatan nasional sekaligus harus menjamin pembagian yang merata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini bukan hanya dalam meningkatkan produksi saja tetapi juga untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia.

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.

Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:<sup>3</sup>

1. Pendapatan disposibel yaitu:

Pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.

---

<sup>3</sup> Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2009), h. 60

2. Pendapatan nasional yaitu:

Nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun.

3. Pendapatan pribadi yaitu pendapatan yang diterima semua rumah tangga dalam perekonomian (atau yang diterima satu keluarga) dari penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari pembayaran pindahan. Pendapatan dan kekayaan bukanlah alat ukur yang lengkap. Sebab tingkat utilitas hidup seseorang tidak selalu tergantung pada pendapatan atau kekayaan. Pendapatan adalah total penerimaan seseorang atau satu rumah tangga dalam beberapa periode tertentu. Pendapatan merupakan konsep aliran.

Ada tiga sumber penerimaan rumah tangga, yaitu :<sup>4</sup>

a. Pendapatan dari gaji dan upah

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji/upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktifitas nya.

---

<sup>4</sup> Pratama Rahardja, dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2006)h.292

b. Pendapatan dari asset produktif

Asset produktif adalah asset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada 2 kelompok asset produktif. *Pertama*, asset financial, seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga, saham yang menghasilkan dividen dan keuntungan atas modal bila diperjualbelikan.

c. Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari pemerintah adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Di Negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan, misalnya dalam bentuk tunjangan pengangguran, jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.

Indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan rumah tangga. Jika pada suatu wilayah distribusi hasil pembangunan cukup merata maka hal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Oleh karena itu, penduduk miskin diidentikan dengan penduduk yang pendapatannya masih berada di

bawah garis kemiskinan.<sup>5</sup>

Dengan mengoptimalkan program-program Unit Pengelola Kegiatan yang sedemikian itu, masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada tindak lanjut program-program yang diselenggarakan. Melalui partisipasi ini akan tumbuh di dalam diri warga masyarakat rasa memiliki bersama terhadap program-program Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Penanggulangan kemiskinan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dilakukan dengan memberdayakan masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa yang tergabung dalam kelompok Program Simpan Pinjam pelaku usaha kecil.

Program simpan pinjam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan Bandung banyak mengalami hambatan dan kendala dalam hal pengambilan uang dari para nasabah atau peminjam antara lain :

---

<sup>5</sup>Ninik Sudarwati. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*. (Malang: Intimedia). h. 16

1. Pengambilan telat atau tidak sesuai dari jadwal yang ditentukan dalam musyawarah.
2. Nasabah tidak dapat membayar atau karena belum memiliki uang.

Walau pun masih banyak hambatan pendekatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) selama ini dinilai berhasil meskipun secara teknis mengalami kendala. Beberapa keberhasilannya berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Sasaran program ini adalah kecamatan-kecamatan miskin di Indonesia diantaranya Kec. Bandung Kab. Serang masuk dalam sasaran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) karena pendapatan masyarakat kecamatan Bandung masih rendah, pekerjaan masyarakatnya mayoritas petani, pedagang, ataupun pekerja tidak tetap.

Usaha kecil sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Banyak masyarakat Kecamatan Bandung Kabupaten Serang yang berdagang kecil-kecilan terutama kaum



perempuan dan ibu-ibu. Usaha kecil perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang kerja dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang.

Kehadiran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diharapkan dapat menjadi sentral kegiatan masyarakat dan menjadikan salah satu program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Pengaruh Bantuan Modal Usaha Terhadap Tingkat Pendapatan Pelaku Usaha kecil (Studi di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Bandung Kabupaten Serang).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diteliti, yaitu:

1. Adakah pengaruh dari bantuan modal usaha terhadap tingkat pendapatan pelaku usaha kecil.
2. Apakah Program bantuan modal usaha yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dapat membantu pelaku usaha kecil dalam menjalankan usahanya.

3. Apakah pemerintah ikut membantu dalam menjalankan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam mengembangkan pelaku usaha kecil
4. Di dalam memberikan pinjaman modal usaha apakah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam
5. Pelaku usaha yang mendapatkan pinjaman, apakah mendapatkan peningkatan ekonomi setelah mendapatkan pinjaman atau sebaliknya

### **C. Batasan Masalah**

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Batasan ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan juga untuk menciptakan keefektifan waktu dalam melakukan penelitian. Data penelitian ini dibatasi pada penerima bantuan dana modal, khususnya untuk pendapatan pelaku usaha kecil sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diteliti, yaitu:

1. Apakah ada pengaruh bantuan modal usaha terhadap tingkat pendapatan pelaku usaha kecil kecamatan Bandung kabupaten Serang ?
2. Seberapa besar pengaruh Bantuan Modal Usaha terhadap tingkat pendapatan pelaku usaha kecil ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh bantuan modal usaha terhadap tingkat pendapatan pelaku usaha kecil.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bantuan modal usaha terhadap tingkat pendapatan pelaku usaha kecil .

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan studi Program Strata satu (S1) pada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten .

## 2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.
- c. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat membantu pengangguran untuk memulai usaha dengan adanya modal usaha yang diadakan oleh unit pengelola kegiatan (UPK) kecamatan Bandung.
- d. dengan adanya bantuan modal yang diadakan oleh unit pengelola kegiatan (UPK) kecamatan Bandung masyarakat dapat meningkatkan usaha kecil agar lebih maju lagi usahanya.

## 3. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. Dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi penelitian berikutnya.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Di Indonesia pengertian mengenai usaha kecil masih sangat beragam. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, pasal 1 butir 1 yaitu :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Milik warga negara Indonesia;
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;

5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi (pasal 5).

Selanjutnya Bank Indonesia dan Departemen Perindustrian mendefinisikan mengenai usaha kecil berdasarkan nilai assetnya. Menurut kedua lembaga tersebut, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang mana assetnya tidak termasuk tanah dan bangunan bernilai kurang dari Rp. 600 juta. Adapun Kadin terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok besar. ***Kelompok pertama***, adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, dan industri. ***Kelompok yang kedua***, adalah yang bergerak dalam bidang konstruksi. Menurut Kadin, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal kerja kurang dari Rp. 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp. 600 juta.

Sehubungan dengan adanya keragaman dalam batasan tersebut, tampaknya perlu untuk diketahui tentang ciri-ciri umum dari usaha kecil. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Mitzerg dan Musselman serta Hughes dapat disimpulkan ciri-ciri umum usaha kecil, yaitu :

1. Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha;
2. Struktur organisasi bersifat sederhana;
3. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar;
4. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan;
5. Sistem akuntansi kurang baik, bahkan sukar menekan biaya;
6. Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas;
7. Margin keuntungan sangat tipis.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada beberapa ciri tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kelemahan dari usaha kecil selain dipengaruhi oleh faktor keterbatasan modal juga tampak pada kelemahan manajerialnya. Hal ini terungkap baik pada kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun pada kelemahan akuntansinya. Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

---

<sup>6</sup> Mitzerg (Strategi Manajemen, New York, 1992) serta Musselman dan Hughes (Introduction to Modern Business, 1992) dikutip oleh Sutojo dkk, *Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Manajemen FE-UI, 1994, hal. 2&9.

Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kriteria usaha kecil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut :

1. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan-penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Meij dalam terjemahan Riyanto mengartikan modal sebagai kolektifitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca debet, sedang yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk pendapatan. Yang dimaksudkan dalam kekayaan terdapat dalam neraca kredit.<sup>7</sup>

Riyanto memberikan definsi modal kerja dalam 3 konsep, yaitu:

---

<sup>7</sup> Suad Husnan, *Manajemen Keuangan* Cetakan I, Jakarta: UT, 2002



### 1. Konsep Kuantitatif

Konsep ini menitikberatkan pada yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Konsep ini menganggap modal kerja adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (Gross Working Capital).

### 2. Konsep Kualitatif

Konsep ini menitikberatkan pada kualitas modal kerja. dalam konsep ini modal kerja diartikan sebagai kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek (*net working capital*), yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman maupun dari pemilik perusahaan.

### 3. Konsep Fungsional

Konsep ini menitikberatkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan (income).<sup>8</sup>

Taylor dalam terjemahan Sawir mengemukakan modal kerja dapat digolongkan dalam beberapa bagian sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Abas Kartadinata, *Pembelajaran Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1999.

4. Modal kerja permanen (permanent working capital) yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha.

Modal kerja permanen dapat dibedakan dalam :

- a. Modal kerja primer (primary working capital) yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.
  - b. Modal kerja normal (normal working capital) yaitu jumlah modal yang diperlukan untuk penyelenggaraan luas produksi yang normal.
5. Modal kerja variabel (variable working capital) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah dengan perubahan keadaan.

Riyanto mengemukakan pada dasarnya modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar yang selama perusahaan dalam keadaan usaha. Periode perputaran modal kerja (working capital turnover) dimulai saat kas diinvestasikan

dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi kas.<sup>9</sup>

Mayers dalam terjemahan Sitohang memandang pendapatan dari sisi efektifitas penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan adalah "Pendapatan adalah nilai barang atau jasa tertentu pada akhir jangka tertentu yang mempunyai indikasi bahwa makna pendapatan bisa saja bergeser seiring dengan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat".

Menurut Sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, bulanan, atau tahunan.<sup>10</sup>

Menurut teori Milton Friedman bahwa pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya. Pendapatan sementara adalah pendapatan yang diperoleh

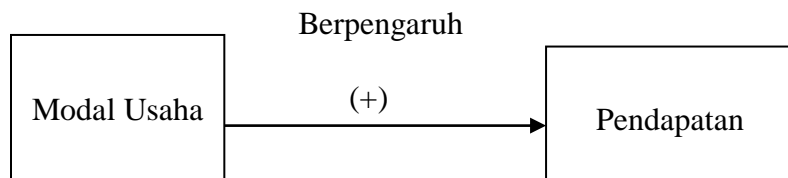
---

<sup>9</sup>Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Modal Kerja* Cetakan I, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002

<sup>10</sup>S. Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

dan hasil semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang.<sup>11</sup>

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Hubungannya antara Modal Usaha dan Pendapatan adalah Jika modal Usaha naik maka pendapatan pun akan ikut naik, begitupun sebaliknya jika modal Usaha turun maka pendapatan yang di dapat pun akan ikut turun. Modal Usaha dan Pendapatan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Karena tingkat pendapatan rumah tangga tergantung kepada jenis-jenis kegiatan yang dilakukan. Jenis kegiatan yang di ikut sertakan modal tinggi, maka pendapatan pun harus tinggi.<sup>12</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini adalah suatu gambaran kecil dari Keseluruhan Karya Ilmiah atau Skripsi ini, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan baik bagi penulis dalam membuatnya juga

---

<sup>11</sup> Manurug Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro*, Edisi Ketiga, Jakarta: LP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.

<sup>12</sup>S. Sukirno, *Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

memudahkan para pembaca untuk mempelajarinya. Dalam sistematika pembahasan ini penulis membaginya kedalam lima bab, yaitu

*BAB I*, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

*BAB II*, Kajian teoretis berisi tentang modal kerja, pendapatan, hubungan antar variabel, hipotesa.

*BAB III*, Metode penelitian berisi waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

*BAB IV*, Pembahasan Hasil Penelitian meliputi gambaran umum obyek penelitian, pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan SPSS.

*BAB V*, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran